

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Siskeudes Sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango

Rahmat Rianto Yusuf, Harun Blongkod, Ayu Rakhma Wuryandini

Universitas Negeri Gorontalo

rahmatyusuf341@gmail.com, blongkod@ung.ac.id, ayurakhma@ung.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of internal control systems and apparatus competence on the accountability of village fund management through the Village Financial System (Siskeudes) as an intervening variable in village governments in Suwawa District, Bone Bolango Regency. This study employed a quantitative approach using survey methods through questionnaires distributed to village officials. Data were analyzed using statistical analysis to examine the relationships among variables. The results show that internal control systems and apparatus competence have a significant effect on the accountability of village fund management. Internal control systems also significantly affect the implementation of Siskeudes, while apparatus competence has no significant effect on Siskeudes. Furthermore, Siskeudes has no significant effect on the accountability of village fund management and is unable to mediate the relationship between internal control systems and apparatus competence on accountability. This study confirms that improving village fund management accountability is more influenced by strengthening internal control systems and apparatus competence rather than relying solely on application systems.

Keywords: Internal Control System, Apparatus Competence, Accountability, Village Funds, Siskeudes.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai variabel intervening pada pemerintah desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur desa. Data dianalisis menggunakan analisis statistik untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal juga berpengaruh signifikan terhadap penerapan Siskeudes, sedangkan kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap Siskeudes. Selain itu, Siskeudes tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan tidak mampu memediasi hubungan antara sistem pengendalian internal maupun kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan akuntabilitas

pengelolaan dana desa lebih dipengaruhi oleh penguatan pengendalian internal dan kompetensi aparatur dibandingkan penggunaan sistem aplikasi semata.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, Dana Desa, Siskeudes.

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan pembangunan tersebut, diperlukan adanya dana desa sebagai sumber pendanaan. Dana desa merupakan salah satu program pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada pelaksanaannya, aparatur desa berkewajiban dalam mengelola keuangan tersebut dengan baik. Mengelola dana desa seharusnya didasari atas transparansi, akuntabel, partisipatif juga dijalankan agar tertib dan disiplin terhadap anggaran (Pratiwi & Dewi, 2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi, penghentian dan penundaan penyaluran dana desa. Dalam pengelolaan yang baik, salah satu prinsip yang harus dipenuhi adalah akuntabilitas.

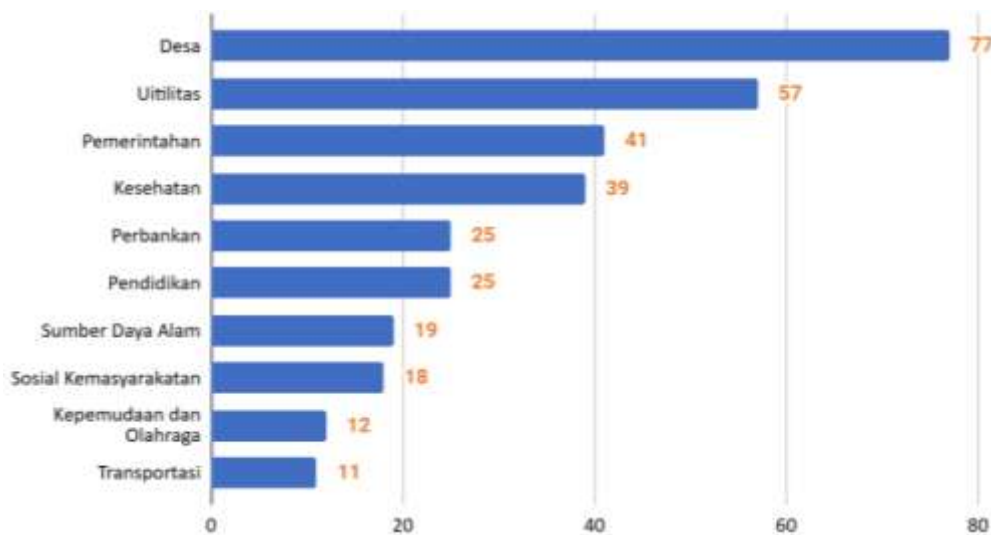
Pengelolaan dana desa tidak lepas dari akuntabilitas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tertulis bahwa akuntabilitas ialah suatu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas selalu terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik yang menyiratkan organisasi publik untuk melakukan urusan publik, mengelola dana publik dan menjamin terwujudnya hak asasi manusia dengan cara yang secara fundamental bebas dari penyalahgunaan dan korupsi, serta taat terhadap supremasi hukum (Liana & Nugroho, 2022)

Akuntabilitas menjadi tolak ukur kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang telah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ika Asmawati & Prayitno Basuki, (2020). Dikutip dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai rincian dana desa per desa tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun, terdiri atas Rp69 triliun dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun

anggaran berjalan dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan. Dari dana Rp71 triliun ini kemudian akan disalurkan ke desa-desa yang ada di Indonesia. Dana yang dikucurkan pemerintah untuk desa dengan nominal yang cukup besar ini menimbulkan kekhawatiran secara serius dalam pengelolaannya (Salote *et al.*, 2024).

Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch*, (2025), tingkat tindak pidana korupsi di level desa menunjukkan tren meningkat dan konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, ICW mencatat 359 kasus korupsi dengan 881 tersangka yang ditangani aparat penegak hukum, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp279 triliun.

Gambar 1. 1 Sektor Teratas Yang Dikorupsi Pada Tahun 2024



Sumber : *Indonesia Corruption Watch*, (2025)

Sektor desa menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2024. tercatat sebanyak 77 kasus dengan 108 tersangka. Kondisi ini mencerminkan bahwa semakin besar alokasi dana desa, semakin besar pula risiko penyalahgunaan apabila tidak dikelola dengan baik. Fenomena tersebut juga harus dicermati di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Bone Bolango yang memperoleh dana yang cukup signifikan. Berikut rincian alokasi dana desa di Kabupaten Bone Bolango:

Tabel 1. 1 Alokasi dana desa di Kabupaten Bone Bolango

Tahun	Jumlah Alokasi
2021	142,18 M
2022	125,58 M
2023	118,12 M
2024	123,34 M
2025	117,32 M

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id>

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan dana desa di Kabupaten Bone Bolango cukup besar. Dana desa yang diberikan ini diharapkan dapat menjadi wujud pemerataan dan tentunya bisa berdampak dalam pembangunan desa. Tetapi dana yang dikucurkan pemerintah untuk desa dengan nominal yang cukup besar ini menimbulkan kekhawatiran secara serius. Menurut sumber yang dirujuk dari (<https://kumparan.com/>) menyatakan bahwa ada dugaan korupsi dana desa oleh oknum kepala desa Bube Baru Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dari sejumlah proyek yang ada seperti proyek jalan beton yang tidak sesuai Rencana Anggaran dan Biaya (RAB). Selain itu, dilansir dari (<https://dulohupa.id/>) menyatakan bahwa dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2018-2019 tidak memiliki laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa masih nyata terjadi. Menurut Wuryandini *et al.*, (2024) dalam beberapa kasus, penyusunan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sering kali dilakukan secara sepihak oleh kepala desa tanpa melibatkan musyawarah bersama aparat desa maupun unsur masyarakat terkait. Dengan pentingnya akuntabilitas pengelolaan dana desa, beberapa penelitian sebelumnya mengkaji faktor-faktor yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang meliputi faktor kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, sistem keuangan desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi (Puspa & Prasetyo, 2020); (Arfiansyah, 2023); (Pratiwi & Dewi, 2022); (Zulkifl *et al.*, 2021); (Indraswari & Rahayu, 2022).

Penelitian ini berfokus pada dua faktor yang diduga dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur, serta menilai sejauh mana siskeudes berperan sebagai variabel intervening. Keterbatasan kompetensi dan lemahnya mekanisme pengendalian dapat menghambat terwujudnya akuntabilitas (Hamad *et al.*, 2024). Pemerintah seharusnya memiliki suatu mekanisme pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melalui penerapan sistem pengendalian internal (Arfiansyah, 2023). Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme sistem pengendalian internal yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel (Kasih Elnis Gulo, 2023). Ketergantungan yang lebih tinggi pada sistem kontrol selalu dikaitkan dengan harapan yang lebih tinggi untuk meningkatkan akuntabilitas (Aziz *et al.*, 2020).

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (2008) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

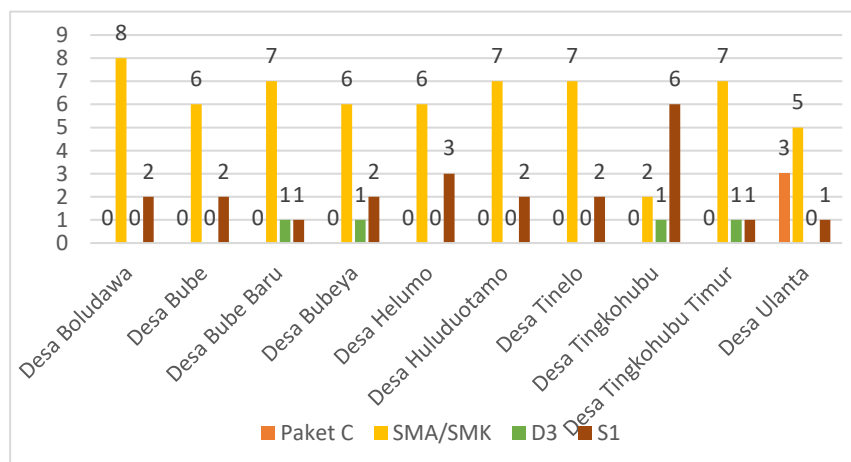
Sebagai bentuk dari adanya sistem pengendalian internal, maka seharusnya ada pemantauan yang dilakukan oleh audit internal. Peran audit internal sangat

penting, karena tugasnya dalam mengawasi sistem pengendalian internal yang efektif sehingga dapat mendeteksi kecurangan (Rahman & Ghazalah Karlina, 2020). Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa, karena mengingat dana yang disalurkan tidaklah sedikit. Selain sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur juga merupakan faktor penting untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena mengingat besarnya dana maka tentunya memerlukan aparatur desa yang memiliki kompetensi memadai dalam mengelola dana desa.

Kompetensi perangkat desa didefinisikan sebagai kemampuan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan taktik dan tanggung jawab yang diberikan (Yusuf *et al.*, 2022). Kompetensi aparatur yang baik menurut Zulkifl *et al.*, (2021) merupakan bagian yang penting dalam proses pengelolaan dana desa dan kegiatan pemerintahan lainnya dimana setiap aparatur desa memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pengelolaan dengan sebaik-baiknya. aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi penyimpangan dalam proses pengelolaan dana desa (Pahlawan *et al.*, 2020). Dengan demikian, kompetensi perangkat desa merupakan kapasitas penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pemerintahan desa. Aparatur yang memiliki kemampuan, komitmen, dan tanggung jawab tinggi berperan besar dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan efektif. Kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang diperlukan untuk secara efektif mengatasi komplikasi sosial dan moral yang melekat dalam tantangan keberlanjutan (Ziafati *et al.*, 2025).

Berdasarkan hasil observasi awal di desa-desa yang ada di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dapat diamati bahwa masih banyak aparat desa yang mayoritas tingkat pendidikannya hanya lulusan SMA. Berikut data tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 1. 2 Tingkat pendidikan aparatur desa di Kecamatan Suwawa Kab. Bone Bolango



Sumber: Data Diolah

Dari data perangkat desa di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, terlihat bahwa mayoritas aparatur desa masih didominasi oleh lulusan SMA/SMK. Misalnya, di Desa Boludawa terdapat 8 aparatur yang berpendidikan SMA/SMK, sementara yang berpendidikan S1 hanya 2 orang. Pola serupa juga terlihat di desa lain seperti Desa Bube Baru dengan 7 orang lulusan SMA/SMK dan hanya 1 orang lulusan D3 serta 1 orang lulusan S1. Bahkan, di beberapa desa seperti Desa Tinelo dan Desa Tingkohubu, seluruh aparatur hanya berpendidikan SMA/SMK tanpa ada yang menempuh jenjang pendidikan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia aparatur desa di Kecamatan Suwawa relatif masih terbatas. Hanya sebagian kecil aparatur yang memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi D3 maupun S1.

Penyebab korupsi salah satunya adalah keterbatasan kompetensi kepala desa dan perangkat desa yang terutama menyangkut pengelolaan teknis dana desa, pengadaan barang dan jasa, serta penyusunan akuntabilitas dana desa (Ash-Shidiqqi & Wibisono, 2018). Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur dapat dimaksimalkan melalui sejumlah variabel intervening, seperti pemanfaatan teknologi informasi (Juniarti *et al.*, 2022), penggunaan Siskeudes (Arfiansyah, 2021; Septiani *et al.*, 2025; Bawono *et al.*, 2020), sikap qana'ah (Dariana *et al.*, 2023), serta partisipasi masyarakat (Setiyaningsih *et al.*, 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Siskeudes sebagai variabel intervening, karena sistem ini dipandang memiliki peran strategis sebagai mekanisme yang menjembatani hubungan antara sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peneliti mengamati bahwa pengelolaan keuangan desa di desa yang ada di kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango telah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangannya. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa Arfiansyah, (2023).

Dengan demikian, Siskeudes menjadi penghubung yang menjembatani sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa dalam menghasilkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, karena sistem tersebut hanya akan menghasilkan output yang benar jika digunakan oleh orang yang kompeten dan diawasi oleh mekanisme kontrol yang memadai. Adanya sistem keuangan desa harusnya dapat membantu pengelolaan keuangan desa dapat dilaporkan dengan baik, namun masih adanya dugaan korupsi di desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa yang merupakan gejala masalah penelitian yang harus mendapatkan penyelesaian.

Terlihat jelas bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan karena dukungan dari riset sebelumnya yang hasil masih inkonsisten, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Arfiansyah, 2023) menunjukkan

bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun hasil penelitian berbeda dengan yang dilakukan oleh (Tiarno & Budiwitjaksono, 2023) yang menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain itu, penelitian sebelumnya juga menyoroti kompetensi aparatur sebagai faktor penting dalam pengelolaan dana desa. Misalnya beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pratiwi & Dewi, 2022) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun berbeda dengan hasil penelitian (Nurain Huda *et al.*, 2024) yang menyatakan kompetensi aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa penelitian terdahulu juga mengkaji sikeudes sebagai variabel intervening, penelitian yang dilakukan oleh (Septiani *et al.*, 2025), dan (Bawono *et al.*, 2020) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan siskeudes

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono, (2024:16) penelitian kuantitatif sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Pendekatan ini berorientasi pada pengukuran objektif terhadap fenomena sosial dengan menggunakan data numerik dan analisis statistik. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan oleh peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan temuan penelitian ini menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi responden di lapangan. Selain itu, studi ini juga memperhitungkan perbandingan dengan teori dan artikel ilmiah yang relevan dengan variabel penelitian.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal (X_1) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Dengan demikian, hipotesis (H_1) diterima sesuai dengan hasil pengujian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (X_1) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), yang bermakna bahwa peningkatan sistem pengendalian internal cenderung diikuti oleh peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Secara teoritis hasil ini sejalan dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Bergman & Lane, (1990), hubungan antara masyarakat dan pemerintah dapat

dipahami sebagai hubungan *principal-agent*, di mana masyarakat berperan sebagai *principal* yang memberikan mandat kepada pemerintah sebagai *agent* untuk mengelola sumber daya publik dan menyediakan layanan kepada masyarakat. Implikasi teori tersebut dalam konteks penelitian ini menegaskan bahwa aparatur pemerintah desa sebagai *agent* memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana desa secara akuntabel. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengendalian internal menjadi penting sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sistem pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini menegaskan bahwa secara konseptual, keberadaan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pemerintah desa. Dengan adanya sistem pengendalian yang efektif, setiap potensi kesalahan, penyimpangan, maupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan dapat dicegah atau segera diperbaiki. Hal ini juga didukung oleh hasil analisis deskriptif responden yang menunjukkan bahwa secara umum penerapan sistem pengendalian internal di desa-desa Kecamatan Suwawa berada pada kategori sangat baik hingga baik. Hal ini terlihat dari tingginya nilai rata-rata pada berbagai indikator, seperti aspek aktivitas pengendalian dan penilaian risiko yang menunjukkan kondisi yang baik, yang tercermin dari adanya evaluasi terhadap kegiatan sebelumnya (mean 4,18), tindak lanjut atas kesalahan (mean 4,27), serta proses peninjauan kembali secara berkala (mean 4,24). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memiliki mekanisme pembelajaran organisasi yang mampu memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Secara praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dapat lebih efektif dicapai melalui penguatan sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, pihak pemerintah desa dan lembaga pengawas sebagai pelaksana dalam mengelola dana desa perlu melakukan evaluasi secara berkala agar akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan lebih optimal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Unsa *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratamayasa *et al.*, (2024) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur (X_2) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Dengan demikian, hipotesis (H_2) diterima sesuai dengan hasil

pengujian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur (X_2) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), yang bermakna bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur yang dimiliki oleh perangkat desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Secara teoritis, berdasarkan perspektif teori keagenan yang dikemukakan oleh Bergman & Lane, (1990), hubungan antara masyarakat dan pemerintah dapat dipahami sebagai hubungan *principal-agent*, di mana masyarakat bertindak sebagai *principal* yang memberikan mandat kepada pemerintah sebagai *agent* untuk mengelola sumber daya publik secara efektif dan bertanggung jawab. Implikasi teori tersebut dalam penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur desa sebagai *agent* memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel. Aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai akan lebih mampu memahami regulasi, serta melaksanakan program sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka semakin baik pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, kompetensi aparatur tidak hanya menjadi faktor penting, tetapi juga merupakan faktor strategis dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hal ini menegaskan bahwa secara konseptual, kompetensi aparatur yang memadai mampu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pemerintah desa.. Kompetensi aparatur mencerminkan kemampuan individu yang meliputi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta sikap profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini juga sejalan dengan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa tingkat kompetensi aparatur desa di Kecamatan Suwawa secara umum berada pada kategori baik hingga sangat baik. Terlihat dari indikator aspek keterampilan teknis dan penempatan kerja, responden juga menunjukkan penilaian yang baik, seperti kesesuaian keahlian dengan tugas yang diberikan (mean 4,06) serta kemampuan teknis dalam melaksanakan pekerjaan (mean 4,00). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa telah berupaya menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan tugas.

Secara praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dapat dicapai melalui peningkatan kompetensi aparatur. Oleh karena itu, pemerintah desa sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan dana desa perlu memberikan perhatian pada peningkatan kompetensi aparatur mengingat kemampuan teknis, manajerial, sosial kultural, serta kompetensi pemerintahan sangat menentukan pengelolaan dana desa secara akuntabel. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkifl *et al.*, (2021) yang menunjukkan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta didukung oleh penelitian yang dilakukan

oleh Puspa & Prasetyo, (2020) dan Yuyun *et al.*, (2025) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal (X_1) berpengaruh signifikan terhadap sistem keuangan desa (Z). Dengan demikian, hipotesis (H3) diterima sesuai dengan hasil pengujian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin optimal pula penerapan sistem keuangan desa (SisKeuDes). Hal ini bermakna bahwa efektivitas implementasi siskeudes pada desa-desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango tidak hanya bergantung pada keberadaan teknologi atau aplikasi semata, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sistem pengendalian internal yang mendukungnya.

Berdasarkan perspektif teori keagenan yang dikemukakan oleh Bergman & Lane, (1990), implikasi teori tersebut dalam penelitian ini menegaskan bahwa sistem pengendalian internal memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi sistem keuangan desa. Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan bahwa penggunaan siskeudes dilakukan secara tepat, tertib, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, potensi kesalahan dalam penginputan data, penyimpangan dalam pencatatan, serta manipulasi informasi keuangan dapat diminimalisir pada desa-desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin optimal pula pemanfaatan sistem yang ada dalam pengelolaan keuangan desa.

Hal ini juga sejalan dengan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa indikator dengan nilai mean tinggi yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan sistem keuangan desa. Seperti indikator “Terdapat proses *review* (peninjauan kembali) secara berkala terhadap hal-hal yang sudah dilakukan dalam suatu kegiatan” dengan nilai mean yang berada pada kategori sangat baik/sangat tinggi (4.24). Kondisi ini mencerminkan bahwa mekanisme pengawasan dan evaluasi telah berjalan secara konsisten dalam praktik pengelolaan keuangan desa. Hal ini secara langsung mendukung optimalisasi pemanfaatan sistem keuangan desa, karena setiap proses yang dilakukan senantiasa dikontrol dan disesuaikan dengan standar yang berlaku.

Secara praktis, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa optimalisasi sistem keuangan desa pada desa-desa di Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, dapat dicapai melalui penguatan sistem pengendalian internal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem keuangan desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi atau teknologi, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas pengendalian internal yang mengatur dan mengawasi penggunaannya. Temuan penelitian ini belum mendapat dukungan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Karena, berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara langsung menguji hubungan antara

sistem pengendalian internal dengan sistem keuangan desa sehingga hubungan antara pengendalian internal dan sistem keuangan desa masih relatif terbatas. Maka, hipotesis yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan kontribusi baru dalam dalam memperkaya literatur

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem keuangan desa (Z). Dengan demikian, hipotesis (H_4) tidak diterima. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem keuangan desa (Y), yang bermakna bahwa tinggi atau rendahnya kompetensi aparatur belum tentu secara langsung menentukan optimalisasi pemanfaatan sistem keuangan desa pada desa-desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi sistem keuangan desa lebih dipengaruhi oleh faktor lain dibandingkan oleh kemampuan individu aparatur.

Walaupun secara konsetual kompetensi aparatur memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sistem keuangan desa. Namun, secara empiris menunjukkan bahwa sistem keuangan desa pada desa-desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango telah dirancang agar mudah untuk dipahami, sehingga dapat dioperasikan oleh aparatur dengan tingkat kompetensi yang beragam selama mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Perangkat desa tidak butuh keahlian akuntansi yang tinggi untuk mengoperasikannya, mereka cukup mengikuti alur yang sudah ada di aplikasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang benar.

Hal ini juga didukung dari hasil analisis deskriptif responden pada indikator Z.12, "*siskeudes memudahkan pemerintah desa dalam memantau penggunaan dana untuk setiap kegiatan*" dengan nilai mean sangat baik/sangat tinggi (4.30). Hal ini merepresentasikan bahwa pemerintah desa merasa dimudahkan dalam mengelola dana sehingga tidak dibutuhkan keahlian khusus dalam mengoperasikan siskeudes. Oleh karena itu hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap sistem keuangan desa pada desa-desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang kompetensi aparatur terhadap sistem keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Septiani *et al.*, (2025) yang menyimpulkan bahwa sistem keuangan desa dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa dan juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bawono *et al.*, (2020) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap sistem keuangan desa dan juga membuktikan jika kompetensi aparatur desa sebagai pengguna diperlukan dalam menjalankan sistem seperti siskeudes. Tetapi berbeda dengan penelitian sebelumnya, hasil analisis dari penelitian ini menemukan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap sistem keuangan desa pada desa-desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten

Bone Bolango. Perbedaan ini dapat dianggap sebagai kontribusi baru untuk memperkaya literatur khususnya untuk memahami peran kompetensi aparatur terhadap sistem keuangan desa, karena berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, belum ditemukan penelitian terdahulu yang sejalan dengan hasil analisis dalam penelitian ini.

Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem keuangan desa (Z) tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Dengan demikian, hipotesis (H5) tidak diterima. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan dan penggunaan sistem keuangan desa belum tentu secara langsung mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Meskipun secara konseptual kehadiran aplikasi sistem keuangan desa menjadi solusi terhadap pengelolaan dana desa. Namun, secara empiris, penggunaan sistem keuangan desa belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dengan demikian, hal ini menunjukkan jika sistem keuangan desa lebih berfungsi sebagai alat administratif dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai faktor untuk mendorong akuntabilitas.

Hal ini menunjukkan jika penggunaan sistem belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Meskipun sistem sudah digunakan, namun belum tentu bisa dijadikan alat untuk menjamin adanya akuntabilitas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, tidak cukup hanya dengan mengandalkan sistem keuangan desa saja, tetapi juga perlu didukung oleh pengendalian internal yang baik, dan kompetensi aparatur yang memadai. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala teknis di Kecamatan Suwawa, seperti sering terjadinya pemadaman listrik serta keterbatasan jaringan internet. Kondisi tersebut dapat menghambat proses penginputan data, pengolahan, hingga pelaporan keuangan desa. Akibatnya, penggunaan sistem menjadi tidak maksimal dan terkadang dilakukan secara tidak rutin atau tertunda.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reu & Lasdi, (2021) yang menunjukkan sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tanawawo, hal ini dikarenakan masih terbatasnya akses penggunaan aplikasi Siskeudes dalam wilayah kecamatan ini sehingga menyebabkan penggunaan aplikasi siskeudes yang diharapkan dapat menjadi salah satu media yang dapat digunakan agent atau aparatur desa dalam menyajikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta meminimalisir adanya kecurangan dana desa menjadi terhambat. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bawono *et al.*, (2020) dan Umayah *et al.*, (2022) yang menunjukkan siskeudes berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Siskeudes Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan nilai pengaruh langsung variabel sistem pengendalian internal (X_1) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung variabel sistem pengendalian internal (X_1) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Artinya bahwa variabel sistem keuangan desa (Z) tidak memediasi pengaruh sistem pengendalian internal (X_1) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) karena besar pengaruh langsung > pengaruh tidak langsung maka H_6 ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal lebih berperan secara langsung dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa tanpa harus melalui sistem keuangan desa.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem keuangan desa digunakan, perannya belum cukup kuat untuk menjadi penghubung antara sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena secara empiris hal ini dapat disebabkan karena sistem keuangan desa masih lebih berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan, belum sepenuhnya menjadi sarana yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan pertanggungjawaban secara langsung pada desa-desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Dengan kata lain, secara praktis akuntabilitas tetap lebih dipengaruhi oleh sistem pengendalian yang dilakukan secara langsung di lapangan dibandingkan melalui penggunaan sistem.

Karena, berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara khusus menguji sistem keuangan desa sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka, hipotesis yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan kontribusi baru dalam memperkaya literatur dalam akuntansi sektor publik khususnya di tingkat desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Siskeudes Sebagai Variabel Intervening

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan nilai pengaruh langsung variabel kompetensi aparatur (X_2) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung variabel kompetensi aparatur (X_2) terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Artinya bahwa variabel sistem keuangan desa (Z) tidak memediasi pengaruh kompetensi aparatur (X_2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) maka H_7 ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur lebih berperan secara langsung dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa tanpa harus melalui sistem keuangan desa.

Meskipun secara konseptual sistem keuangan desa yang jika dapat dioperasikan dengan baik dan maksimal akan meningkatkan akurasi laporan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Bawono *et al.*, 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem keuangan desa digunakan, perannya belum cukup kuat untuk

menjembatani pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pada desa-desa di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Hal ini berarti kemampuan, pengalaman, serta pemahaman aparatur terhadap tugas dan tanggung jawabnya menjadi faktor utama dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, aparatur yang kompeten tetap dapat bekerja secara akuntabel meskipun tanpa bergantung sepenuhnya pada sistem. Karena secara empiris hal ini disebabkan karena peran kompetensi aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas lebih banyak terjadi secara langsung. Kondisi di lapangan juga turut mempengaruhi, seperti keterbatasan jaringan internet dan seringnya terjadi pemadaman listrik, yang menyebabkan penggunaan sistem tidak selalu berjalan optimal.

Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang mengkaji variabel sistem keuangan desa yang dijadikan sebagai penghubung variabel sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Bawono *et al.*, (2020) dan Arfiansyah, (2021) yang menyimpulkan bahwa sistem keuangan desa dapat memediasi sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena penggunaan sistem keuangan desa yang efektif di pemerintahan desa dapat memudahkan desa dalam mengelola penggunaan dana desa secara efisien, mengelola kegiatan operasional, dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui siskeudes sebagai variabel intervening maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan sistem pengendalian internal menjadi penting sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka semakin baik pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
3. Semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin optimal pula pemanfaatan sistem yang ada dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Tinggi atau rendahnya kompetensi aparatur belum tentu secara langsung menentukan optimalisasi pemanfaatan sistem keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi sistem keuangan desa lebih dipengaruhi oleh faktor lain dibandingkan oleh kemampuan individu aparatur.
5. Jika sistem keuangan desa lebih berfungsi sebagai alat administratif dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai faktor untuk mendorong akuntabilitas.
6. Meskipun sistem keuangan desa digunakan, perannya belum cukup kuat untuk menjadi penghubung antara sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena sistem tersebut belum dimanfaatkan secara

optimal, atau akuntabilitas pengelolaan dana desa lebih dipengaruhi faktor lain di luar sistem.

7. Meskipun sistem keuangan desa digunakan, perannya belum cukup kuat untuk menjembatani pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas. Dengan kata lain, aparatur yang kompeten tetap dapat bekerja secara akuntabel meskipun tanpa bergantung sepenuhnya pada sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Bube Baru Gelar Aksi Tuntut Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa.* (2025). <https://dulohupa.id/aliansi-masyarakat-bube-baru-gelar-aksi-tuntut-dugaan-penyalahgunaan-dana-desa/>
- Arfiansyah, M. A. (2021). Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Wonogiri dengan Sistem Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2, 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.70>
- Arfiansyah, M. A. (2023). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.5963>
- Ash-Shidiqqi, E. A., & Wibisono, H. (2018). Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 195–212. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27524>
- Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. (2020). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 163–169. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01096-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01096-5)
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (n.d.). <https://www.bpkp.go.id/id/produkLayanan/produk/pY/sistem-keuangan-desa-siskeudes>
- Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., & Rahayu, A. K. (2020). Factors Affecting Accountability of Village Fund Management through Implementation of the Village Financial System (SISKEUDES). *Journal of Accounting and Investment*, 21(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2103160>
- Bergman, M., & Lane, J. E. (1990). Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*. <https://doi.org/DOI:10.1177/0951692890002003005>
- Blongkod, H. (2023a). *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern* (T. Media (Ed.)). CV Tahta Media Group.
- Blongkod, H. (2023b). *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern* (T. Media (Ed.)). Tahta Media Group.
- Cindy Marisca, A. M. (2025). Pengaruh Sistem Keuangan , Sistem Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Jurnal Keuangan dan

- Manajemen Terapan. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(1), 332–349.
- Clemens, S., Schmidt, J., Adam, M., & Benlian, A. (2026). International Journal of Information Management Increasing developers ' code accountability perceptions in open source software development. *International Journal of Information Management*, 86(August 2025), 102974. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2025.102974>
- Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*. (2012).
- Diansari, R. E., Musah, A. A., & Othman, J. B. (2023). Factors affecting village fund management accountability in Indonesia : The moderating role of prosocial behaviour. *Cogent Business & Management*, 10(2), 1–25. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219424>
- Ghozali, I. (2016). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS 24*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamad, W. El, Pupovac, S., & Moerman, L. (2024). Transparency and public accountability: Does the Nigerian extractive industries transparency initiative deliver? *The Extractive Industries and Society*, 19(October 2023), 101514. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101514>
- Hariyono, S. (2016). Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS LiSREL PLS. In *PT IPU*.
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset AKuntansi*, 3(2), 36–48. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i2.2547>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kasih Elnis Gulo, S. M. K. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 2, 39–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.56248/jamane.v2i1.67>
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=57440>
- Liana, S. ., & Nugroho. W.S. (2022). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kaliangkrik). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 2828–0725, 1–15. <https://journal.unimma.ac.id>
- Mahsun, M., Sulistiyowaty, F., & Purwanugraha, H. A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (7th ed.). BPFE - YOGYAKARTA.
- Nurain Huda, Harun Blongkod, & Ayu Rakhma Wuryandini. (2024). Pengaruh

- Kompetensi Aparat Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. *Economic Reviews Journal*, 3(4), 1723–1734. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.536>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pengerjaan Proyek Jalan tidak Sesuai RAB, Warga di Gorontalo Gelar Aksi.* (2025). <https://kumparan.com/banthayoid/pengerjaan-proyek-jalan-tidak-sesuai-rab-warga-di-gorontalo-gelar-aksi-1srgodpBMVm/1>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.* (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. 71. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pratamayasa, D. P., Murapi, I., & Ajiani, I. P. F. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 12, 367–376. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.xxxx>
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 183–198. <https://doi.org/10.55927/ijba.v1i2.24>
- Purnamasari, R., Ismaya, A., Zulfikar, R., & Yazid, H. (2024). Do internal control and information systems drive sustainable rural development in Indonesia? *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(1), 100242. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100242>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem

- pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada Pemerintah Desa di Kota Pariaman). *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 20(2), 281–297. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>
- Putra, D., Murapi, I., Putri, I., & Ajiani, F. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi , Partisipasi Masyarakat , Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 12(1), 18–32.
- Rahman, & Ghazalah Karlina. (2020). Sistem Pengendalian Internal Dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 3(1), 20–27. <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA>
- Reu, F. M., & Lasdi, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4.
- Salote, F., Usman, & Wuryandini, A. R. (2024). Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Survey Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Telaga Biru). *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7(1), 181–200.
- Septiani, S., Putra, W. E., & Mansur, F. (2025). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *J-MACC : Journal of Management and Accounting*, 8(1), 103–117. <https://doi.org/10.52166/j-macc.v8i1.8797>
- Setyawasih, R., Rustandi, Ningsih, L. K., Sitompul, P., Dewi, S. R., Hemamahua, A., Ritonga, S., Prastiwi, N. L. P. E. Y., Hadiningrat, J. K., Kadiman, S., Syarweny, N., Gorda, E. S., Adnyana, I. P. A., Erdiansyah, R., Tiong, P., & Hutapea, B. (2023). *Human Capital Manajemen*. Pradina Pustaka.
- Sudjana, N. (2014). *Metode Penelitian*. Rineka, Cipta.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). ALFABETA, cv.
- Sunyoto, D. (2009). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Penerbit MedPress.
- Sutrepti, N. L. P. A., Sumadi, N. K., & Muliati, N. K. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa Sekecamatan Petang. *Jurnal Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 60, 25–35.
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana. https://books.google.co.id/books?id=OhZNDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip), Dan Penggunaan Siskeudes Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1596–1608. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3015>
- Umayah, I., Arisyahidin, & Mutiara, N. (2022). Otonomi Vol. 22 Nomor 1 Edisi April 2022. *Journal Uniska*, 22(April), 101–112.

<https://doi.org/https://doi.org/10.32503/otonomi.v22i1.2406>

- Unsa, F. P., Wulandari, A., Suryana, A. K. H., & D.P, Y. N. (2024). Pengaruh Kompetensi Apratur Pengelola Dana Desa. Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penggunaan Siskeudes Terhadap AKuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi .*, 12(2), 367–376.
- Usman, A., & Sundari, S. (2024). the Influence of Village Financial System (Siskeudes Application), Transparency, and Internal Control on Fraud Prevention. *Public and Municipal Finance*, 13(2), 24–30. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(2\).2024.03](https://doi.org/10.21511/pmf.13(2).2024.03)
- Watch, I. C. (2025). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*.
- Wuryandini, A. R., Panigoro, N., Bito, A., & Djunaidi, Y. R. (2024). Pengaruh Bystander Effect dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 8(02), 336–350.
- Yusuf, N., Wuryandini, A. R., Gumohung, M. R., & Usman, Y. (2022). The Influencing Factors of Village and Fund Management Accountability with Sirendes as Moderating Variables. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 7(10), 439–443. www.ijisrt.com439
- Yuyun, S., Yusuf, N., & Taruh, V. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 4(2), 72–86. <https://doi.org/DOI:10.37479/jamak.v4i2.357>
- Ziafati, A., Baker, M., Cheshmehzangi, A., Goodspeed, R., Scott, M., Sharifi, A., Shirazi, M. R., Valler, D., Assche, K. Van, Stangl, P., Butt, A., Gkartzios, M., Rom, E., Brovarone, E. V., Pull, E., Broeck, P. Van Den, Rafael, C., Akbari, P., Cotella, G., ... Katsigianni, X. (2025). Progress in Planning Planning competencies and transformative pedagogy for sustainable development Paulina Nordstr o. *Progress in Planning*, 200(August). <https://doi.org/10.1016/j.progress.2025.100996>
- Zulkifl, Z., Sandrayati, S., & Ariani, N. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. *JEMBATAN (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi)*, 6(1), 26–38. <https://doi.org/10.54077/jembatan.v6i1.55>